

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Adisasmita Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Albert Kurniawan, *Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis: Teori, Konsep, dan Praktik Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan. 2021. *Visi Misi*. Diakses melalui situs <https://dinasbpkad.asahankab.go.id/index.php/pages/visi-misi>
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan. 2021. *Struktur Organisasi*. Diakses melalui situs <https://dinasbpkad.asahankab.go.id/index.php/pages/struktur-organisasi>
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan. 2021. *Tupoksi Dinas*. Diakses melalui situs <https://dinasbpkad.asahankab.go.id/index.php/pages/tupoksi-dinas>
- Bailey, et. al, *Understanding Alternative Media*. Poland: OZGraf S. A, 2008.
- Darwanis. 2019. Pengukuran Transparansi Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Kabupaten atau Kota di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol 4(1), 153-161.
- Darise, N, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks Fauziah, 2012.
- Deky Prayudistiro. “Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Pada Asset Tetap Di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (BPPKAD)”, *Jurnal Universitas Trunojoyo Madura.*, 2017.
- Dwi Martani, et. al, *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Efferin Sujoko, et. al, *Metode Penelitian. Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

- Epi Amelia, Manajemen Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Manajemen Pengelolaan Penggunaan Kendaraan Dinas). *Jurnal Manajemen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, 2015.
- Esduo Ramadhano dan Darwanis, *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Aceh*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 4, No. 2, 2019.
- Fasiha. Analisis pengelolaan aset daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2013.
- Humas Lembaga Penelitian. 2021. *Jenis-Jenis Data Penelitian*. Diakses melalui situs <https://penalaran-unm.org/jenis-jenis-data-penelitian/>, Pada Tanggal 23 Agustus 2021, Pukul 15.52 WIB.
- Hendra Harmain, Aqwa Naser Daulay, Debby Tamara Enre. 2020. *Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Doi: 10.30868/ad.v3i01.752. E-ISSN: 2614-8838 - P-ISSN: 2356-1866.
- Hestria Novianti Siama, “*Manajemen Aset Daerah Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tana Toraja*”. Skripsi. Program Akuntansi Universitas Hasanudin, 2013.
- Horngren, *et. al*, *Akuntansi Edisi ke-6*. Jakarta: PT Indeks, 2012.
- Ilal, V., & Pinatik, S. 2015. “Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon”. *Jurnal EMBA* 818 Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal. 818-830.
- Kemuning, Sri Astri. Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto. Srikripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar, 2017.
- Monika Sutri Kolinug, Ventje Ilal Ilal, Sherly Pinatik. Analisis pengelolaan aset tetap pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, Vol. 3, No.1, 2015.

- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Mursyidi, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Edisi Ke-4. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: CV Sinar Baru, 2012.
- Ramadhan Aditya, "Analisis Aktiva Tetap pada PT. Sentosa Periode 2015-2017". Skripsi. Program Studi Diploma III Keuangan Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Risna Susila Erawati, *Prosedur Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Pada KSU BMT Mentari Bumi Kemangkon*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2017.
- Rudianto, *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Sajady, H, et. al, S. *Evaluation of The Effectiveness of Accounting Information Systems. International Journal of Information Science and Technology*, Vol. 6, No. 2, 2010.
- Situmorang, Helmi, et. al, *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Medan: Usu Press, 2011.
- Smith, J. A and Osborn, M. *Psikologi Kualitatif: Panduan Praktis Metode Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sodikin. et. al, *Akuntansi Pengantar*. Edisi Sembilan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Sugianto, et.al. *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Sebagai Implementasi Pp 71/2010 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan*. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI). Volume 3 Nomor 2 (2019) Halaman 101 -113. p-ISSN: 2615-1227 - e-ISSN: 2655-187X.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

-----, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suwardjono, *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2013.

Wahyu Kristiani, *Analisis Pengaruh Efektivitas Teknologi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individual Pegawai PT. Kim Eng Sekuritas Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, 2012.

Yusuf, *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Penerbit Salemba, 2010.



Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

Daftar Informan:

No	Nama	Jabatan
1	Ismet, S.H	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Asahan
2	Jumino Sastro, S.H	Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Asahan
3	Dwi Priyayi Sugesti, S.E.	Sub Bidang Pencatatan, Pelaporan dan Analisa Kebutuhan Barang Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Asahan
4	Chairun Nasri Hutagaol, S.E.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Asahan
5	Elviriwati, S.E.	Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Asahan
6	Erna Komalasari, S.T	Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan Barang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Asahan
7	Budi Syahriza, S.H.	Sub Bidang Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Asahan

Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran : (1)
Informan : Ismet, S.H.
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di
Kabupaten Asahan
Hari atau Tanggal :

1. Seberapa pentingnya asset tetap bagi keuangan daerah pada Kabupaten Asahan?

Asset tetap bagi keuangan daerah pada Kabupaten Asahan ini sangatlah penting sehingga membutuhkan perhatian yang sangat serius, disebabkan memiliki kontribusi besar juga kadang menimbulkan suatu permasalahan yang sering muncul pada opini audit BPK dikarenakan dalam pengeloannya sebagian pihak tidak memperdulikan pelaporan asset dan hanya memiliki fokus pada keuangan saja. Sehingga faktor tersebut menyebabkan harus melakukan langkah-langkah didalam mengelola asset secara benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Opini didalam audit BPK memiliki kontribusi yang besar dan haruslah diberikan perhatian yang ekstra pula dalam pengelolaannya.

2. Bagaimana pengelolaan asset tetap yang selama ini telah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Asahan?

Yaitu dengan melakukan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan. penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

3. Bagaimana proses sistem dan prosedur akuntansi asset tetap yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dalam mengatasi permasalahan dalam penerapan sistem dan prosedur akuntansi yang berkaitan dengan asset tetap di Kabupaten Asahan?

Proses sistem dan prosedur akuntansi asset tetap yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan secara keseluruhan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 tentang pedoman

teknis pengelolaan barang milik daerah, yaitu meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran. Penggunaan, penatausahaan, pemidahan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti kerugian.

4. Apa yang menjadi hambatan dalam pengelolaan asset tetap yang ada di Kabupaten Asahan? (Jawaban No 3)

Ya, terdapat beberapa hambatan dalam pengelolaan asset tetap yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu pertama terkait kepatuhan yang terjadi dalam proses perencanaan kebutuhan serta penganggaran juga masih terdapat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tidak patuh dalam membuat serta menyerahkan daftar RKMBD dan RKPMBD yang ditujukan kepada Badan Keuangan Daerah (SKPKD). Proses pengamanan serta pemeliharaan yang disebabkan tidak adanya penetapan status pengguna barang dalam proses penggunaan yang sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016. Sehingga hal tersebut yang erat kaitannya dengan proses pengamanan barang yang tidak diketahui siapa pengguna barang yang disebabkan kelalaian SKPD dalam membuat berita acara dalam rangka serah terima pengguna barang dengan pengurus barang.

Hambatan kedua yaitu regulasi yang belum tersedia dalam bentuk peraturan daerah menyulitkan aparatur daerah yang bertugas untuk mengelola dan bertanggung jawab atas keamanan barang milik daerah dalam proses pengamanan dan pemeliharaan.

Hambatan ketiga, yaitu mengenai pencatatan roses penatausahaan seperti salah catat dalam penggolongan aset tetap, tidak dilaksanakan pencatatan atau pemindahan saldo aset yang telah dipindahtangankan atau telah dihapuskan serta tidak adanya rincian barang sehingga tidak diketahui secara jelas dan rinci terkait penggolongan dan kodefikasi barang. Hambatan keempat adalah pemahaman sumber daya manusia dalam hal ini aparatur daerah selaku pelaksana pengelolaan aset daerah yang masih belum memadai.

Hambatan kelima yaitu, sikap dan persepsi dari aparatur daerah yang menganggap pengelolaan aset sebagai hal yang tidak memiliki pengaruh

penting dibandingkan pengelolaan keuangan daerah, maka aparatur menjadi tidak patuh terhadap regulasi yang ditetapkan.

5. Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk meminimalisir kesalahan dalam mengelola asset tetap di Kabupaten Asahan?

Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan para pengurus barang dalam proses perencanaan barang milik daerah untuk meminimalisir kesalahan dalam mengelola asset tetap di Kabupaten Asahan, sehingga pengelolaan barang milik daerah dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Selain itu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah membuat melakukan evaluasi sederhana dengan mengumpulkan data kemudian mencatat mengenai keadaan sebelum dan setelah dilakukannya pelaksanaan suatu program, setelah itu membuat perbandingan antara keadaan sebelum dan setelah dilaksanakannya program yaitu agar mempermudah untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya masalah dalam melaksanakan program. Evaluasi secara berkala yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan akan membantu meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembuatan program atau rencana yang lebih baik nantinya serta memudahkan aparatur dalam memilih solusi terbaik dalam mengatasi suatu masalah dalam pelaksanaan program.

Lampiran : (2)

Informan : Jumino Sastro, S.H dan Dwi Priyayi Sugesti, S.E

Jabatan : Sub Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di
Kabupaten Asahan

Hari atau Tanggal :

1. Bagaimana kelengkapan dokumen sumber dalam Pengelolaan Aset Tetap atau Barang Milik Daerah di Kabupaten Asahan? Apakah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dari segi administratif?

Jika membahas mengenai kelengkapan dokumen sumber dalam Pengelolaan Aset Tetap atau Barang Milik Daerah di Kabupaten Asahan, sudahlah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dari segi administrative, karena terdapat 16 dokumen sumber sesuai dengan UU tersebut, yaitu (1) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (2) Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (3) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (4) Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (5) Daftar Barang Pengguna atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (6) Kartu Inventaris Barang (7) Daftar Barang Milik Daerah (8) Buku Inventaris Dan Buku Induk Inventaris (9) Laporan Barang Semesteran Dan Tahunan (10) Laporan Barang Milik Daerah (11) Surat Perjanjian Pinjam Pakai (12) Bukti Kepemilikan Atas Nama Pemerintah Daerah (13) Daftar Hasil Pemeliharaan Barang (14) SK Penghapusan (15) SK Pemindahtanganan (16) SK Status Penggunaan Barang Milik Daerah.

2. Bagaimana siklus pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Asahan?

Terdapat 11 siklus pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Asahan, Pertama yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran yaitu dengan merumuskan rincian kebutuhan aset tetap untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Kedua, yaitu pengadaan yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, tetapi bisa juga dilimpahkan kepada SKPD untuk membentuk panitia pengadaan. Ketiga, yaitu penggunaan

mengenai penegasan pemakaian asset daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah kepada pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Keempat, yaitu pendayagunaan asset daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam, pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. Kelima, melakukan pengamanan dan melakukan pemeliharaan. Keenam, melakukan penilaian asset daerah pada saat melakukan kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan melibatkan penilaian independen yang bersertifikat di bidang penilaian asset. Ketujuh, melakukan pemindahtanganan asset tetap yang dihapus dari Daftar Inventaris BMD tetapi masih memiliki nilai ekonomis. Kedelapan, melakukan pemusnahan apabila asset daerah tidak dapat digunakan kembali, serta dimanfaatkan serta tidak dapat dipindahtanganan. Kesembilan, melakukan penghapusan asset daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna atau kuasa pengguna dan pengelola dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berbeda dalam penguasaannya. Kesepuluh, penatausahaan dengan melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Selanjutnya kesebelas, melakukan pembinaan, pengendalian dan melakukan pengawasan.

3. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Asahan dengan adanya Permendagri Nomor 19 Tahun 2016? Pengimplementasiannya itu dilakukan dengan proses pengelolaan secara umum sesuai yang tertera pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016”
4. Bagaimana penetapan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah Kabupaten Asahan? Semuanya sesuai aturan yang berlaku pada daerah yaitu pada penggunaan harus terlebih dahulu melakukan pengajuan penetapan status penggunaan BMD yang disertai dengan dokumen. Pada penetapan pemanfaatan yaitu

memiliki beberapa persyaratan administratif seperti memiliki NPWP, membuat surat Pakta Integritas, menyampaikan dokumen penawaran beserta dokumen pendukungnya, dan memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas. Kemudian untuk penetapan pemindahtanganan yaitu dilakukan terlebih dahulu penilaian untuk mendapatkan nilai wajar. Pemindahtanganan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

5. Bagaimana kebijakan pengamanan barang milik daerah?

Kebijakan yang secara umum diterapkan yaitu pengamanan pada dokumen kepemilikan barang milik daerah seperti BPKB kendaraan dinas dan bangunan.

6. Bagaimana proses usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Seperti yang dikatakan tadi pemindahtanganan harus melalui proses penilaian terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai wajar dan setelah itu harus memiliki persetujuan terlebih dahulu dengan nilai wajar tersebut kepada DPRD.

7. Bagaimana siklus pengelolaan barang milik daerah dimulai dari proses penerimaan barang hingga penghapusan aset daerah?

Semuanya ada diruang lingkup Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang dimana semua setiap tahap harus memiliki persetujuan terlebih dahulu lalu pengajuan dokumen sebelum semuanya diproses.

Lampiran : (3)

Informan : Chairun Nasri Hutagaol, S.E. dan Elviriwati, S.E.

Pekerjaan : Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Asahan

Hari atau Tanggal :

1. Bagaimana pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD?

Pada barang milik daerah dengan pengguna barang, lalu kuasa pengguna barang dan pengurus barang.

2. Bagaimana proses pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah?

Yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi serta pemeriksaan dari Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan.

3. Bagaimana membuat laporan penerimaan, penyaluran dan persediaan barang milik daerah kepada kepala SKPD?

Semua pihak yang berkepentingan dengan penggunaan barang berkoordinasi dengan semua panitia pengurus barang.

4. Bagaimana pelaksanaan usulan penghapusan barang milik daerah pada barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi?

Usulan kepada pengelola untuk dipertimbangkan sebagai barang untuk dihapuskan dan bila kondisi masa manfaat masih diatas 30% maka harus ada keterangan dari instansi terkait.

5. Apakah kewenangan dari pelaksanaan sudah jelas dan digunakan dengan sebagaimana semestinya?

Semuanya sudah jelas, namun ada beberapa ketidakpahaman terhadap regulasi pertimbangannya untuk kemaslahatan.

6. Apakah hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah pada Peremendagri Nomor 19 Tahun 2016 ?

Yang pertama itu pemahaman pengguna barang masih kurang/lemah terhadap aturan seperti tidak menggunakan BMD sebagaimana mestinya lalu ada beberapa pejabat yang mempunyai keinginan untuk memiliki BMD terkadang menyalahi aturan/bertentangan.

Lampiran : (4)

Informan : Erna Komalasari, S.T dan Budi Syahriza, S.H.

Jabatan : Sub Bidang Pencatatan, Pelaporan dan Analisa Kebutuhan Barang Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Asahan

Hari atau Tanggal :

1. Apakah ada perbedaan sistem pengelolaan pada masing-masing barang milik daerah? Seperti perbedaan pengelolaan kendaraan dinas dan bangunan?

Dalam hal implementasi aturan umum semuanya sama yang membedakan hanyalah pada saat ada benturan kepentingan.

2. Bagaimana penyajian laporan keuangan yang digunakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan?

Penyajian laporan keuangan yang digunakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Majene berdasarkan hasil wawancara yaitu terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

3. Bagaimanakah proses perencanaan kebutuhan barang milik daerah Kabupaten Asahan?

Kebijakan ini kan di atur dalam peraturan Pemerintah, dimana kita berkewajiban memanfaatkan peraturan tersebut dengan baik dan bijaksana. Disini kita merasa perlu untuk mengembangkan dan memanfaatkan peraturan yang ada dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan kita.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B-10352/EB.I/KS.02/12/2021

08 Desember 2021

Lampiran : -

Hal : **Izin Riset**

**Yth. Bapak/Ibu Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah
Kabupaten Asahan kisanan**

Assalamulaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Yusril Mahendra Pasaribu
NIM : 0502173513
Tempat/Tanggal Lahir : Gunung Melayu, 13 April 1999
Program Studi : Akuntansi Syariah
Semester : IX (Sembilan)
**Alamat : JL. SUKARAME LK. VrnAEK KANOPAN TIMUR Kelurahan
AEK KANOPAN TIMUR Kecamatan KUALUH HULU**

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl Turi No. 79 Kisanan Kabupaten Asahan, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

***EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI ASET TETAP PADA
BADAN PENGELOLALAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN ASAHAN***

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 08 Desember 2021
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



*Digitally
Signed*

Dr. Marliyah, M. Ag
NIP. 197601262003122003

Tembusan:

**- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara
Medan**

info : Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat



